

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI: PERLU KOMITMEN, BUKAN SEKADAR DOKUMEN

Mahfudzah Kaltsum Kamilah
mahfudzahkaltsumkamilah26@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Bayangkan sebuah kantor pemerintah yang di dindingnya terpampang tulisan besar “Zona Integritas” dan “Wilayah Bebas Korupsi”. Dokumen kebijakan antikorupsi lengkap tersedia, kode etik sudah ditetapkan, dan pelatihan antikorupsi dilakukan secara rutin. Namun, di balik semua itu, praktik titip proyek, pungli, dan suap masih terjadi. Bagi saya, kondisi seperti ini bukanlah fiksi, realitanya masih sering ditemukan di banyak lembaga pemerintahan dan menjadi tanda bahwa sesuatu yang lebih mendasar belum terselesaikan.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan yang lengkap. Undang-Undang antikorupsi diterapkan sejak 1999, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk, dan berbagai regulasi terus dikembangkan. Meski demikian, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya 34 dari 100 (Transparency International, 2023), menunjukkan bahwa aturan yang ada belum cukup efektif. Selama akar permasalahan tidak teratasi, “Zona Integritas” hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata, dan kebijakan apapun hanya akan tertulis rapi tanpa perubahan signifikan. Pertanyaannya bukan lagi “apakah aturan sudah ada?” melainkan “mengapa aturan yang ada tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh?”

Menurut saya, pertanyaan ini penting untuk dibahas sekarang. Korupsi bukan hanya soal pejabat yang ditangkap atau uang negara yang hilang, tetapi soal ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat setiap harinya. Ketika seseorang harus membayar lebih agar urusannya cepat selesai, atau ketika anggaran untuk puskesmas bocor sebelum sampai ke pasien, dampaknya nyata dan terasa. Jika kita serius ingin memperbaiki keadaan, maka kita harus jujur mengakui bahwa masalahnya bukan kurang aturan, melainkan kurang komitmen untuk menjalankannya.

2. PERNYATAAN OPINI / TESIS

Saya berpendapat bahwa kebijakan antikorupsi tidak akan mendapatkan hasil nyata jika hanya berupa dokumen saja. Faktor utama keberhasilan adalah komitmen nyata dari pelaksana,

pengawasan yang efektif, dan pembentukan budaya yang menolak korupsi, bukan hanya ketakutan terhadap hukuman. Saya meyakini bahwa ketiga hal ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Komitmen tanpa pengawasan mudah memudar, pengawasan tanpa budaya akan disiasati, dan budaya tanpa komitmen dari pemimpin tidak akan pernah terbentuk. Tanpa ketiganya berjalan bersama, simbol “Zona Integritas” di kantor hanyalah pajangan kosong yang tidak menyentuh kenyataan di lapangan.

3. ARGUMEN ILMIAH

3.1. Argumen Pertama

Mayoritas pelaku korupsi yang tertangkap bukan karena tidak mengetahui hukum, melainkan karena kurangnya integritas. Banyak pejabat atau bahkan petugas penegak hukum yang terlibat kasus, menunjukkan bahwa masalah utama bukan karena kurangnya aturan, tetapi karena rendahnya moral. Praktik kecil seperti memanipulasi absensi, menerima gratifikasi kecil, atau memarkir anggaran fiktif bisa menjadi awal dari korupsi yang lebih besar di masa depan (Valentina, 2024).

Peran seorang pemimpin sangat berpengaruh. Seorang kepala dinas yang membiarkan pungutan kecil mengirimkan pesan bahwa aturan bisa dilanggar. Sebaliknya, seorang pemimpin yang menolak gratifikasi meski tidak ada yang mengawasi akan menciptakan budaya integritas yang lebih kuat daripada sekadar banyak halaman aturan yang tertulis (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Bagi saya, inilah yang paling sering luput dari perhatian: kita terlalu sibuk memperbaiki sistemnya, tetapi lupa memperbaiki manusianya.

3.2. Argumen Kedua

Korupsi biasanya terjadi di bidang yang memiliki dana besar dan prosedur yang rumit. Klitgaard (1988) menekankan bahwa korupsi berkembang ketika kekuasaan besar tidak diimbangi pengawasan yang efektif. Semakin banyak prosedur dalam birokrasi, semakin besar peluang untuk dimanipulasi.

Namun, pengawasan tidak harus susah atau mahal. Sistem pelaporan yang aman untuk melaporkan pelanggaran, transparansi laporan keuangan kepada masyarakat, serta penggunaan teknologi seperti e-procurement telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko korupsi (Aprilla et al., 2024). Yang penting bukan menciptakan sistem baru, tetapi konsisten menggunakan mekanisme yang sudah ada. Menurut saya, justru di sinilah letak kegagalan kita selama ini: sistem yang baik sudah ada, tetapi tidak dijalankan dengan serius.

3.3. Argumen Ketiga

Masih banyak orang berpikir bahwa memberi sedikit suap itu normal. Contohnya, orang tua yang mengajarkan anak untuk memberi suap agar urusan selesai dengan cepat, atau atasan yang membiarkan anak buah menerima gratifikasi kecil. Perilaku seperti ini dilakukan tanpa disadari, tetapi justru membawa budaya korupsi kepada generasi berikutnya. Hukum saja tidak cukup efektif jika norma sosial masih membiarkan praktik itu terjadi (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi sejak kecil sangat penting. Tidak hanya mengajarkan bahwa “korupsi itu salah”, tetapi membiasakan sikap jujur: menulis jawaban sendiri saat ujian, tidak menyontek, dan berani melaporkan jika terjadi kecurangan. Kebiasaan kecil ini bisa menjadi fondasi untuk menjaga integritas ketika menghadapi godaan korupsi di lingkungan kerja (Dewi, 2023).

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Kita sering lebih menghabiskan waktu membuat kebijakan daripada memastikan kebijakan itu dijalankan dengan baik. Banyak lembaga merasa bangga memiliki sertifikat “Wilayah Bebas Korupsi” meskipun cara kerja di lapangan tidak berubah banyak. Masalah utamanya bukan karena kurangnya aturan, melainkan karena tidak jujur mengakui bahwa penerapannya belum maksimal.

Masyarakat juga memiliki peran dalam hal ini. Setiap kali kita memilih jalur “uang damai” atau hanya diam melihat tindakan tidak jujur dari atasan, kita sebenarnya membantu mempertahankan sistem korup itu. Perubahan nyata terjadi ketika setiap orang, mulai dari pejabat teratas hingga warga biasa, menolak tindakan korupsi dalam bentuk apa pun.

5. PENUTUP

Kita tidak butuh kebijakan antikorupsi baru, tetapi butuh keberanian untuk menjalankan aturan yang sudah ada. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Tidak ada dokumen pun, bahkan yang terpanjang sekalipun, bisa menggantikan komitmen seseorang untuk tetap jujur meskipun tidak ada yang memperhatikan. Tiga langkah yang bisa dilakukan segera:

1. Jadikan pelatihan tentang integritas sebagai bagian dari penilaian kinerja harian, bukan hanya sekali setahun.

2. Buka semua data anggaran secara transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
3. Mulai dari diri sendiri. Pemberantasan korupsi yang efektif dimulai dari individu yang tidak berkompromi.

Integritas pada akhirnya bukan hanya soal aturan yang tertulis, tetapi juga soal pilihan yang dilakukan setiap hari.

REFERENSI

- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Dewi, N. K. (2023). Pentingnya pendidikan antikorupsi dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 12(1). <https://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/view/7874>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Diklat PRESTASI: Bangun teladan nilai integritas wujudkan sikap antikorupsi. <https://www.kpk.go.id>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. *Annual Review of Political Science*, 19(1), 15–34.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Valentina, A. (2024). Langkah-langkah utama dalam pencegahan korupsi: Membangun integritas dan transparansi di masyarakat. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 167–180. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.206>